

## KETIMPANGAN LUAS LAHAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Rinto Tamu Ama<sup>1\*</sup>, Elfis Umbu Katongu Retang<sup>2</sup>, Junaedin Wadu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen  
Wira Wacana Sumba

<sup>1</sup>Email\*: [rintotamuama@gmail.com](mailto:rintotamuama@gmail.com)

Submitted: 22-02-2022 | Revisions: 21-04-2022 | Accepted: 03-06-2022

### ABSTRACT

*Agricultural land is one of the factors of production that can affect the yield and income of the land being worked on. The wider the area of land cultivated, the greater the possibility of the farmer to earn higher incomes. This research was conducted in East Sumba Regency through the East Sumba Regency Agriculture and Food Service and the East Sumba Regency Central Statistics Agency during November - December 2021. This research aims to find out the magnitude of the level of widespread inequality of planting and widespread inequality of basic food harvest of production between sub-districts in East Sumba Regency. The data in this study used secondary data of time series during 2017 - 2020 found in 22 sub-districts in East Sumba Regency. The analysis methods used are the Williamson Index and the Length of Food Availability. The results of the analysis showed high inequality in planting area and area of staple food harvest between sub-districts in East Sumba Regency. Williamson's inequality index for planting area is 0.59 and harvest area is 0.58. This high inequality occurs due to the widespread distribution of planting and uneven harvest area and is also caused by the number of residents between sub-districts. The average availability of rice equivalent staple food at the level of East Sumba Regency reached the adequacy of basic food for 2,830 days. This means that East Sumba Regency has been able to meet food adequacy for 365 days. In East Sumba Regency, there are 3 sub-districts that have not had enough food availability for 365 days, namely Waingapu City only enough for 13 days, Kanatang 273 days and Haharu 347 days.*

*Keywords: Williamson Index, Planting Area, Harvest Area, Staple Food Availability*

### ABSTRAK

*Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dan pendapatan dari lahan yang dikerjakan. Makin luas lahan yang diusahakan maka makin besar pula kemungkinan petani tersebut untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur selama bulan November - Desember 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan luas tanam dan ketimpangan luas panen pangan pokok hasil produksi antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu (time series) selama tahun 2017 – 2020 yang terdapat pada 22 kecamatan di Kabupaten Sumba*

*Timur. Metode analisis yang digunakan yaitu Indeks Williamson dan Lama Ketersediaan Pangan. Hasil analisis menunjukkan ketimpangan yang tinggi pada luas tanam dan luas panen pangan pokok antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Indeks ketimpangan Williamson untuk luas tanam adalah sebesar 0,59 dan luas panen 0,58. Ketimpangan tinggi ini terjadi karena adanya persebaran luas tanam dan luas panen yang tidak merata dan juga disebabkan oleh jumlah penduduk antar kecamatan. Rata-rata ketersediaan pangan pokok setara beras ditingkat Kabupaten Sumba Timur mencapai kecukupan pangan pokok selama 2.830 hari, artinya Kabupaten Sumba Timur sudah mampu memenuhi kecukupan pangan selama 365 hari. Di Kabupaten Sumba Timur, ada 3 kecamatan yang belum mencukupi ketersediaan pangan pokok selama 365 hari, yaitu Kota Waingapu hanya mencukupi selama 13 hari, Kanatang 273 hari dan Haharu 347 hari.*

*Kata kunci : Indeks Williamson, Luas Tanam, Luas Panen, Ketersediaan Pangan Pokok*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2004). Namun, pembangunan lingkup ruang tidak selalu merata, ketimpangan pembangunan antar wilayah seringkali menjadi masalah yang penting bagi pembangunan suatu wilayah (Wahyuntari & Pujiati, 2018). Jadi, ketimpangan pembangunan suatu wilayah jika tidak mampu diatasi dengan baik akan menimbulkan krisis yang lebih rumit seperti masalah kependudukan, sosial, politik dan lingkungan serta dapat merugikan proses dan hasil pembangunan yang hendak dicapai suatu wilayah (Mopangga, 2014).

Menurut (Mulyani et al., 2020) Upaya untuk mendukung perekonomian nasional, sektor pertanian diharapkan berperan dalam bentuk: a) Penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk, b) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan baku bagi industri dan ekspor, c) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan d) Memberi sumbangan pada pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan pangan dalam suatu daerah bisa tercukupi bila memiliki potensi lahan pertanian yang bagus dan dikelola secara maksimal untuk menjamin peningkatan dan kesinambungan produksi.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Sumba Timur tidak hanya berfokus pada Sektor Industri atau sejenis, namun berfokus juga pada sektor pertanian yang sangat penting, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian utama sebagai petani. Suatu daerah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesejahteraan rakyatnya merupakan hal yang penting dengan meningkatkan sektor pertanian, meningkatkan produksi pangan melalui penanaman tanaman unggulan yaitu tanaman pangan (Sakip, 2017).

Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil dan pendapatan dari lahan yang dikerjakan. Makin luas lahan yang diusahakan maka makin besar pula kemungkinan petani tersebut

untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, namun sebaliknya semakin sempit lahan yang diusahakan maka makin kecil pula kemungkinan petani untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, perbedaan tingkat penguasaan lahan dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu kelompok masyarakat pertanian (Jannah & Kurniawati, 2018). Luas lahan merupakan komponen penting untuk meningkatkan produksi dengan adanya pengolahan lahan yang efisien dan produksi pangan yang maksimum dengan memenuhi ketersediaan pangan yang cukup.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan hidupnya. Dalam upaya pemenuhan pangan, ketersediaan pangan dalam wilayah merupakan aspek penting yang menentukan terpenuhinya konsumsi pangan. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam suatu wilayah (*Adelina et al., 2012*). Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Sumba Timur bermata pencaharian sebagai petani yang mengusahakan tanaman pangan pokok. Sebuah wilayah dikatakan daerah sentra produksi pangan pokok apabila produksi pangan pokok dalam wilayah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahkan melakukan ekspor (BPS Sumba Timur, 2020).

Secara Administratif Kabupaten Sumba Timur memiliki 22 Kecamatan dengan total luas lahan sebesar 700.050 ha. dimana luas lahan pertanian dengan luas lahan basah sebesar 25.149 ha dan lahan kering sebesar 546.405 ha, yang tersebar di 22 kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki potensi dan luas lahan yang berbeda-beda (BPS Sumba Timur, 2020). Dengan adanya perbedaan luas lahan pertanian disetiap kecamatan maka dapat menyebabkan adanya perbedaan potensi lahan pertanian antar kecamatan baik dalam hal luas tanam, kemampuan lahan, iklim dan sumberdaya air. Perbedaan potensi lahan pertanian antar kecamatan inilah yang menyebabkan ketimpangan luas tanam pangan pokok dan ketimpangan luas panen pangan pokok antar kecamatan.

Luas panen dapat berbeda lebih kecil dari luas tanam yang selalu berubah setiap tahun akan menyebabkan perbedaan luas tanam dan luas panen antar kecamatan disebabkan karena adanya kekeringan, curah hujan yang tidak menentu, organisme pengganggu tanaman dan banjir yang menyebabkan terjadinya ketimpangan luas lahan pertanian. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Timur terus meningkat, dimana jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 252.704 jiwa menjadi 261.503 jiwa pada tahun 2020. Karena hasil produksi yang selalu berubah maupun menurun dan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun akan berdampak pada ketersediaan pangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai seberapa besar tingkat ketimpangan luas lahan dan lama ketersediaan pangan pokok hasil produksi antar Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, dengan mengkaji data luas tanam, luas panen, produksi pangan, jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk selama 4 tahun dari tahun 2017-2020.

## **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat desain penelitian yang terdiri dari jenis data, sumber data, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan data deret waktu (*time series*), selama periode tahun 2017-2020. Pengumpulan data sekunder selama bulan November - Desember 2021.

Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. Jenis data yang digunakan meliputi: data luas tanam, luas panen dan produksi dari tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, data jumlah penduduk dan data jumlah rumah tangga selama tahun 2017-2020.

Luas wilayah daratan Sumba Timur 7000,50 ha yang tersebar pada 1 pulau utama (Pulau Sumba) dan 3 pulau kecil yaitu Pulau Prai Salura, Pulau Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenghuni). Sekitar 40% luas Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian Selatan, dimana lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur, sementara daerah bagian Utara berupa dataran yang berbatu dan kurang subur.

Berikut adalah Gambar Peta Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari 22 Kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda:



**Gambar 1**  
 Peta Kabupaten Sumba Timur

Metode analisis data yang digunakan untuk menghitung nilai ketimpangan luas tanam dan ketimpangan luas panen adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_{ib} - Y)^2 \sum \frac{f_k}{kk}}}{Y}$$

Keterangan untuk ketimpangan luas tanam dan luas panen yaitu :

**IW** merupakan Indeks Wiliamson, **Y<sub>ib</sub>** merupakan Jumlah luas tanam/panen per kepala keluarga di kecamatan i (Kkal), **Y** merupakan Rata-rata luas tanam/panen per kepala keluarga di kabupaten (Kkal), **f<sub>k</sub>** merupakan Jumlah kepala keluarga di kecamatan i (kk), **kk** merupakan Jumlah kepala keluarga di kabupaten (kk).

Kriteria penilaian Indeks Wiliamson adalah Sebagai berikut: Angka 0,0 sampai 0,20, maka ketimpangan rendah, angka 0,21 sampai 0,35, maka ketimpangan sedang dan angka > 0,35, maka ketimpangan tinggi.

Metode analisis data digunakan untuk menghitung lama ketersediaan pangan adalah:

$$\text{LKP} = \frac{\sum \text{Ketersediaan pangan pokok ekuivalen beras}}{\frac{\sum \text{Penduduk}}{2.200 \text{ Kkal}}}$$

Keterangan: **LKP** = Lamanya ketersediaan pangan ekuivalen beras (hari).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Luas Tanam Pangan Pokok Antar Kecamatan Di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 – 2020

Menurut (Sukirno, 2004) Ketimpangan adalah perbedaan yang membuat tingkat pembangunan diberbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah. Ketimpangan luas tanam adalah perbedaan luas tanam dimana adanya ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang terjadi pada setiap wilayah yang disebabkan oleh adanya perbedaan potensi wilayah pertanian. Berikut hasil analisis ketimpangan luas tanam pangan pokok antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.



Sumber: Analisis data sekunder (2021)

#### Grafik 1

### Ketimpangan Luas Tanam Pangan Pokok Antar Kecamatan Di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 – 2020

Menurut (Andiaskiton, 2019), Kriteria penilaian Indeks Williamson adalah Sebagai berikut: Angka 0,0 sampai 0,20, maka ketimpangan rendah, angka 0,21 sampai 0,35, maka ketimpangan sedang dan angka > 0,35, maka ketimpangan tinggi. Grafik 1. Menunjukkan bahwa ketimpangan luas tanam pangan pokok dari tahun 2017 – 2020 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi dengan rata-rata 0,59 karena memiliki nilai ketimpangan kriteria Indeks Williamson lebih dari 0,35. Pada tahun 2017 memiliki nilai ketimpangan sebesar 0,54 dan pada tahun 2018 –2020 memiliki nilai ketimpangan yang sama yaitu sebesar 0,61. Hal ini sama dengan penelitian (Ar-rozi et al., 2014) yang mengemukakan bahwa hasil analisis perbandingan antara perdesaan contoh di Blitar dan Probolinggo, di Jawa Timur dengan perdesaan contoh di Bulukumba, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa distribusi luas penguasaan dan luas garapan di desa dengan basis utama

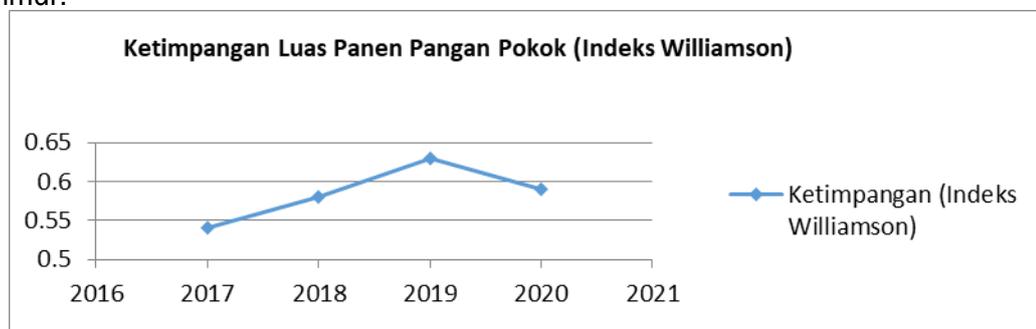
komoditas jagung di Jawa tidak merata dibandingkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Secara rata-rata, indeks Gini luas penguasaan dan luas garapan di tiga desa contoh berbasis komoditas utama jagung relatif hampir sama, yaitu masing-masing sebesar 0,47 dan 0,48, yang berarti termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang.

Tingginya ketimpangan luas tanam pangan pokok pada tahun 2017 sebesar 0,54, hal ini terjadi karena disebabkan oleh perbedaan potensi lahan pertanian di Kabupaten Sumba Timur yang menyebar secara tidak merata pada tiap kecamatan yang memiliki luas tanam pangan pokok yang sempit seperti Kecamatan Haharu sebesar 6.814 Ha, Pinu Pahar 9.322 Ha, Wula Wajijelu 9.756 Ha, Paberi Wai 11.548 Ha, Kota Waingapu 11.860 Ha, pada kecamatan tersebut potensi untuk pengembangan lahan pertanian yang kurang mendukung dikarenakan merupakan wilayah perkotaan dan potensi kecamatan lain dengan topografinya yang berbukit. Namun ada kecamatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pertanian dengan luas tanam yang luas yaitu kecamatan Lewa 38.755 Ha, Kampera 36.661 Ha, Karera 33.204 Ha, Pandawai 32701 Ha, Lewa Tidahu 31.261 Ha, hal ini sejalan dengan penelitian (*Fahrizal et al., 2019*) yang menyatakan bahwa Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan fenomena yang umum terjadi dalam proses kegiatan pembangunan ekonomi suatu wilayah, ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Namun pada tahun 2018 - 2020 tingkat ketimpangan meningkat menjadi 0,61 yang terjadi yaitu sejajar atau tetap selama tiga tahun karena luas tanam tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan secara signifikan, tetapi disebabkan oleh jumlah kepala keluarga yang mengusahakan lahan pertanian terus meningkat pada tiap kecamatan, hal ini sejalan dengan penelitian (*Amir, 2012*) yang menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan antar wilayah adalah perbedaan kondisi demografi, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk.

#### **Ketimpangan Luas Panen Pangan Pokok Antar Kecamatan Di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 – 2020**

Ketimpangan luas panen adalah perbedaan luas panen dimana adanya ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang terjadi pada setiap wilayah yang disebabkan oleh adanya perbedaan luas panen karena adanya potensi lahan produksi pertanian yang berbeda antara wilayah. Berikut hasil analisis ketimpangan luas panen pangan pokok antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.



Sumber: Analisis data sekunder (2021)

**Grafik 2**

Ketimpangan Luas Panen Pangan Pokok Antar Kecamatan Di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 – 2020

Menurut (Andiaskiton, 2019), Kriteria penilaian Indeks Wiliamson adalah Sebagai berikut: Angka 0,0 sampai 0,20, maka ketimpangan rendah, angka 0,21 sampai 0,35, maka ketimpangan sedang dan angka > 0,35, maka ketimpangan tinggi. Grafik 2. Menunjukkan bahwa ketimpangan luas panen pangan pokok dari tahun 2017 – 2020 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi dengan rata-rata 0,58 karena memiliki nilai ketimpangan Williamson lebih dari 0,35. Pada tahun 2017 memiliki nilai ketimpangan sebesar 0,54, 2018 sebesar 0,58, 2019 sebesar 0,63 dan 2020 sebesar 0,59. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tiara, 2016) bahwa penelitiannya yang menyatakan hasil perhitungan dengan rumus index Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Sembilan provinsi di Indonesia selama tahun 2002 - 2014 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Bahwa antara Sembilan provinsi di Indonesia selama periode 2002 - 2014 tingkat pemerataan atau ketimpangan pendapatan berada ditingkat ketimpangan sangat tinggi yaitu nilai indeks lebih besar dari 0,39.

Tingginya ketimpangan luas panen pangan pokok di tiap kecamatan pada tahun 2017 sebesar 0,54 dengan total luas panen sebesar 335.965 Ha, dan mengalami kenaikan nilai ketimpangan yang tidak signifikan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 0,58 dengan total luas panen sebesar 394.587 Ha, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan nilai ketimpangan yang signifikan yaitu sebesar 0,63 karena memiliki total luas panen yang kecil yaitu sebesar 291.299 Ha. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai ketimpangan sebesar 0,59 dengan total luas panen sebesar 392.417 Ha, hal ini terjadi karena luas panen pangan pokok antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur tidak menyebar secara merata, ada kecamatan yang memiliki luas panen pangan pokok yang sempit dan ada kecamatan yang memiliki luas panen, karena luas tanam antar kecamatan berbeda, maka luas panen antar kecamatan pun berbeda, (BPS Sumba Timur, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian (Mamani, 2017) mengemukakan bahwa ketimpangan luas panen pangan pokok dari tahun 2006 – 2015 di provinsi NTT dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi, artinya luas panen pangan pokok antar kabupaten/kota di Provinsi NTT tidak menyebar secara merata, ada kabupaten yang memiliki luas panen pangan pokok yang sempit dan ada kabupaten yang memiliki luas panen yang luas. Karena luas tanam antar kabupaten berbeda, maka luas panen antar kabupaten pun berbeda.

Penyebab angka ketimpangan luas panen pangan pokok selalu berubah setiap tahun di karenakan adanya serangan hama dan penyakit seperti hama belalang yang menyerang pada kecamatan tertentu sehingga membuat hasil pertanian seperti jagung mengalami penurunan produksi, (Dinas Pertanian Dan Pangan Sumba Timur, 2021), selain itu kekeringan juga menjadi penyebab berkurangnya luas panen, hal ini dikarenakan curah hujan di kawasan Sumba Timur relatif rendah (kurang dari 2.000 mm/tahun) yang berlangsung 3 sampai 4 bulan (J & Sai, 2009).

#### **Lama Ketersediaan Pangan Pokok Hasil Produksi Ekuivalen Beras Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 – 2020**

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia untuk di konsumsi setiap individu atau penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk unsur gizinya. (Syarief *et al.*, 2014) menyatakan bahwa Ketersediaan pangan (*food availability*) di suatu daerah atau negara ditentukan oleh beberapa faktor seperti keragaman produksi pangan, tingkat kerusakan, kehilangan karena penanganan yang kurang tepat dan ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dipertahankan sama atau lebih besar dari pada kebutuhan penduduk terhadap pangan.

---

Kabupaten Sumba Timur memiliki rata-rata luas produksi pangan pokok dari tahun 2017-2020 sebesar 765.082 ton untuk tanaman padi, 387.830 ton jagung, 61.492 ton ubi kayu dan 14.332 ton ubi jalar. Jadi, Pangan jagung, ubi kayu dan ubi jalar di ubah menjadi ekuivalen beras sehingga diperoleh jumlah energi pangan pokok setara beras (Kkal). Rata-rata lama ketersediaan pangan pokok untuk Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar 1.601.483.293.089 Kkal setara beras mampu bertahan selama 2.830 hari dengan rata-rata jumlah penduduk sebesar 257.074 jiwa. Berbeda dengan penelitian (*Fallo et al., 2019*) yang mengungkapkan Ketersediaan pangan pokok pada rumah tangga petani di Desa Napi tergolong dalam kategori persediaan pangan rumah tangga kurang cukup karena rata-rata lama konsumsi pangan di Desa Napi hanya mencapai 207 hari.

**Tabel 1**  
 Lama Ketersediaan Pangan Pokok Hasil Produksi Ekuivalen Beras Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017– 2020

No	Kecamatan	Lama Ketersediaan Pangan Pokok (hari)				
		2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Lewa	4.739	5.180	6.416	5.728	5.516
2	Nggaha Ori Angu	3.563	4.484	5.407	5.008	4.616
3	Lewa Tidahu	10.118	12.192	12.101	12.091	11.626
4	Katala Hamu Lingu	5.320	8.520	9.609	7.002	7.613
5	Tabundung	3.237	2.756	3.603	2.247	2.961
6	Pinu Pahar	3.374	1.505	1.766	2.989	2.409
7	Paberi Wai	1.851	3.608	5.459	4.635	3.888
8	Karera	4.571	7.452	5.722	4.717	5.616
9	Matawai La Pawu	5.412	6.271	5.532	5.209	5.606
10	Kahaugu Eti	2.545	1.405	4.095	2.888	2.733
11	Mahu	3.587	5.787	6.871	6.283	5.632
12	Ngadu Ngala	2.906	8.823	9.178	6.676	6.896
13	Pahunga Lodu	1.536	3.172	2.163	1.915	2.197
14	Wula Waijelu	1.714	1.849	2.690	1.880	2.033
15	Rindi	2.103	4.195	4.251	4.733	3.821
16	Umalulu	1.993	1.675	2.156	1.404	1.807
17	Pandawai	2.603	3.230	2.863	1.768	2.616

---

<b>18</b>	Kambata Mapambuhang	1.200	1.112	5.152	3.337	2.700
<b>19</b>	Kota Waingapu	11	10	21	8	13
<b>20</b>	Kambera	1.661	1.722	1.596	1.255	1.559
<b>21</b>	Haharu	77	7	598	704	347
<b>22</b>	Kanatang	353	257	270	211	273
	<b>Sumba Timur</b>	<b>2.369</b>	<b>2.943</b>	<b>3.253</b>	<b>2.753</b>	<b>2.830</b>

---

*Sumber: Analisis Data Sekunder (2021)*

Tabel 1. Menunjukkan rata-rata ketersediaan pangan pokok setara beras ditingkat Kabupaten Sumba Timur mencapai kecukupan pangan pokok selama 2.830 hari. Artinya Kabupaten Sumba Timur sudah mampu memenuhi kecukupan pangan selama lebih dari 365 hari. Ketersediaan pangan pokok yang selalu berubah dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan produksi pangan.

Di Kabupaten Sumba Timur dari 22 kecamatan, masih ada 3 kecamatan yang belum mencukupi ketersediaan pangan selama 365 hari, yaitu Kota Waingapu hanya mencukupi selama 13 hari, Kanatang 273 hari dan Haharu 347 hari. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mamani, 2017) mengemukakan bahwa ketersediaan pangan pokok hasil produksi di tiap kabupaten Di provinsi NTT kurang dari 365 hari, berarti masih kekurangan pangan pokok hasil produksi setara beras dan harus memenuhi ketersediaan pangan pokok dari luar produksi pangan pokok, sehingga perlu upaya ketersediaan pangan pokok dengan cara pembelian pangan pokok atau peningkatan produksi pangan pokok.

Peningkatan produksi dengan cara meningkatkan lahan potensi pertanian yang belum di kelola seperti Kecamatan Kota Waingapu lahan potensi pertanian yang belum dikelola adalah sebesar 160 ha, Kanatang 226 ha dan Haharu 13.800 ha dengan potensi lahan cocok untuk budidaya jagung untuk memenuhi lama ketersediaan pangan pokok setara beras selama 365 hari, untuk kecamatan yang masih kekurangan pangan yaitu dengan cara meningkatkan produksi pangan pokok dan membeli dari luar kecamatan yang melebihi lama ketersediaan pangan pokok. Hal ini tidak sama dengan penelitian (Mamani, 2017) Bahwa ketersediaan pangan pokok setara beras disetiap kabupaten selalu berubah setiap tahun dan rata-rata lama ketersediaan pangan pokok setara beras di tingkat kabupaten tidak mencukupi selama 365 hari, hal ini disebabkan karena produksi pangan setiap tahun selalu berubah dan populasi penduduk terus bertambah setiap tahun.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

Rata-rata ketimpangan luas tanam dan ketimpangan luas panen pangan pokok antar kecamatan di Kabupaten Sumba Timur termasuk kategori ketimpangan tinggi (tidak merata), dengan rata-rata nilai ketimpangan luas tanam 0,59 dan ketimpangan luas panen 0,58. Rata-rata ketersediaan pangan pokok setara beras ditingkat kecamatan di Kabupaten Sumba Timur mencapai kecukupan pangan pokok selama 2.830 hari. Artinya Kabupaten Sumba Timur sudah mampu memenuhi kecukupan pangan selama 365 hari.

## SARAN

Pemerintah perlu memperhatikan dan mengembangkan potensi yang ada disetiap kecamatan seperti pemanfaatan lahan pertanian yang belum dikelola. Agar ketersediaan pangan pokok setara beras dapat tercapai pada tingkat kecamatan yang masih kurang, perlu adanya peningkatan produksi dan produktivitas pangan pokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, P., Lubis, S., & Ayu, S. (2012). Analisis Rasio Ketersediaan Dengan Konsumsi Pangan di Kota Medan. *Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*.
- Amir, H. (2012). Ketimpangan antar wilayah melebar atau merapat. *Jurnal Warta Fiskal*, 5(2), 16–19.
- Andiaskiton, M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80.
- Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 484–498.
- Ar-rozi, A. M., Strategis, R., Pertanian, K., Kementan, R., Pertanian, K., Pertanian, R., Revitalisasi, G., Lahan, K. P., Lahan, P., Lahan, D., & Berbasis, K. (2014). *Berbasis Palawija*. 4, 27–39.
- BPS Sumba Timur. (2020). *Sumba Timur Dalam Angka*.
- Fahrizal, Sarfiah, S. N., & Juliprijanto, W. (2019). Analisis ketimpangan ekonomi provinsi jawa tengah 2008-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(4), 399–417. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/803/459>
- Fallo, Y. K., Lango, A. N. ., & Hendrik, E. (2019). AKSES DAN KETERSEDIAAN PANGAN POKOK PADA RUMAH TANGGA PETANI DI DESA NAPI KECAMATAN KIE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Yeberni. *Buletin EXCELLENTIA*, VIII(1), 53.
- Ika Wahyuntari, L., & Pujiati, A. (2018). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 296–305. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153>
- J, I. H. P., & Sai, S. S. (2009). *KONSERVASI LAHAN KAWASAN KABUPATEN SUMBA TIMUR Kustamar*. VII.
- Jannah, A., & Kurniawati, T. (2018). ANALISIS KAJIAN POTENSI EKONOMI WILAYAH KABUPATEN AGAM. *Jurnal Ecogen*, 1(2), 474–481.
- Mamani, imanuel m. (2017). *Ketimpangan Luas Lahan Dan Ketersediaan Pangan Pokok Hasil Produksi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Analisis Data Sekunder Tahun 2006 – 2015)*. Universitas Cendana Kupang.
- Mariyani, S., Prasmatiwi, F. E., & Adawiyah, R. (2017). Ketersediaan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 5(3), 304.
- Mopangga, H. (2014). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika Journal*, 10(1), 40–51.
- Mulyani, S., Putri, F. M., Andoko, B. W., Akbar, P., & Novalia, S. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 421. <https://doi.org/10.22146/jkn.60703>
- Sakip, I. A. (2017). *PENGARUH INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015*. University of Muhammadiyah Malang.
-

- Sukirno, S. (2004). Makro ekonomi teori pengantar edisi ketiga. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Syarief, H., Damanik, R. M., Sinaga, T., & Doloksaribu, T. H. (2014). Pemanfaatan daun bangun-bangun dalam pengembangan produk makanan tambahan fungsional untuk ibu menyusui. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(1), 38–42.
- Tiara, S. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 5, 1–16. <https://www.neliti.com/publications/77513/analisis-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-propinsi-sumatera-utara>.